

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

RESKY ANJAS

E211 15 305



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

RESKY ANJAS. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, xv + 87 Halaman +16 Tabel +3 Gambar, dibimbing oleh Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.si dan Dr. Muh. Tang Abdullah, S.sos., MAP

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sosial adalah dengan membuat kebijakan yaitu program keluarga harapan yang biasa disingkat dengan PKH. Namun dalam penerapannya masih sering ditemui masalah seperti tidak meratanya pendataan dan penyaluran program ini sehingga diperlukan penelitian untuk mengamati bagaimana pengimplementasian Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tellu Limpoe kabupaten Sidenreng Rappang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen yang merupakan pengambilan data dan dokumen-dokumen atau hasil penelitian sebelumnya

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa implementasi program keluarga harapan di kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum maksimal dan masih terdapat kekurangan, terutama dari segi komunikasi dan sumber daya yang belum memadai. Oleh karna itu, diharapkan agar pihak-pihak pelaksana PKH lebih memperhatikan dan lebih tegas sehingga penerima program keluarga harapan dapat dilakukan secara merata

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH)



HASANUDDIN UNIVERSITY

FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE

ABSTRACT

RESKY ANJAS. Iplementation of the Family of Hope Program in Tellu Limpoe District Sidenreng Rappang Regency, xv + 87 pages + 16 tables + 9 pictures, supervised by Dr. Indrayati Nur Indar, M.si and Dr. Muh. Tang Abdullah S. sos, MAP

Social welfare is the goal of the unitary State of the Republic of Indonesia. One of the government's efforts to achieve social welfare is to make policies, namely the family hope program which is commonly abbreviated as PKH. However, in its application, problems are still often encountered such as uneven data collection and distribution of this program so that research is needed to observe how the implementation of the Family Hope Program in Tellu Limpoe District, Sidenreng Rappang regency and the factors that influence it.

The research approach used is descriptive qualitative. There are three data collection techniques in this study, namely observation, interviews and document studies which are data collection and documents or the results of previous research.

From the results of the study, it shows that the implementation of the family hope program in Tellu Limpoe sub-district, Sidenreng Rappang Regency is still not optimal and there are still shortcomings, especially in terms of inadequate communication and resources. Therefore, it is hoped that the PKH implementers will pay more attention and be more assertive so that the recipients of the family hope program can be carried out evenly

Keywords : Implementation. Family Hope Program (PKH)



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Resky Anjas

NIM : E21115305

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 12 Juli 2022



Resky Anjas



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Resky Anjas
NIM : E21115305
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)
di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten
Sidenreng Rappang

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak
untuk Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 Juli 2022

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.si

NIP. 196412181988032001

Pembimbing II

Dr. Muh. Tang Abdullah, S.sos., MAP

NIP. 19720507 200212 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Nurain Nara, M.Si

NIP. 19630903 198903 1 002



UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Resky Anjas
NIM : E21115305
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan
(PKH) di Kecamatan Tellu Limpoe
Kabupaten Sidenreng Rappang

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim Penguji Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 12 Juli 2022

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.si

(.....)

Sekretaris Sidang : Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P.

(.....)

Anggota : 1. Dr. Nurdin Nara, M.si

(.....)

2. Dr. Badu M, si

(.....)

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan/. karena menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Penulis senangtiasa menerima jika terdapat masukan dan kritikan dari pembaca.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan segenap cinta, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda tercinta **Anjas** dan ibunda terkasih **Hadrah**, saudara-saudari saya **Aditya, Ririn, dan Elsha** serta Orang terkasih penulis **Karwan dan Kayla Aryesti** yang selalu memeberika doa dan semangat sehingga penulis bisa sampai tahap terakhir dari proses awal perkuliahan hingga saat ini dan berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga semua berada dalam lindungan-NYA

Dalam pembuatan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta para wakil, staf, dan jajarannya
3. Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin serta selaku dewan penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membangun dalam penyelesaian skripsi
4. Bapak **Dr. Muhammad Tang Abdullah, MAP** selaku Sekertaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin serta selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, arahan, saran, kritik dan menjelaskan ketidakpahaman dalam Menyusun skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
5. Ibu **Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.si** selaku dosen pembimbng I yang telah meluangkan waktu dan dan memberikan arahan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak **Dr. Badu M. Si** selaku dewan penguji dalam ujian skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membangun dalam menyelesaikan skripsi
7. Ibu **Dr. Hj. Hasniati, M.Si** selaku penasehat akademik yang senangtiasa memberikan saran dan masukan terkait perencanaan studi penulis

8. **Dosen Pengajar Departemen Ilmu Administrasi** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin atas bimbingan, didikan dan motivasi yang diberikan selama ini
9. Seluruh **Staf Departemen Ilmu Administrasi** (Ibu Rosmina, Ibu Dharma) dan Staf Lingkup Fisip Unhas tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya selama ini
10. Sahabat-sahabat saya **Isna, Fina, dan Nita** yang telah menjadi saudara, tempat berbagi canda, tangis dan tawa, serta banyak membantu penulis sampai saat ini
11. **Champion 2015** yang Namanya tidak bisa penulis cantumkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan kehangatan yang telah diberikan kepada penulis dari masa pengkaderan sampai sekarang. Semoga semua berjalan sesuai dengan harapan dan sukses selalu untuk kalian.
12. **HUMANIS FISIP UNHAS, RELASI 012, RECORD 013, dan UNION 014** yang telah memberikan ilmu dan pengalaman organisasi bagi penulis selama masa perkuliahan.
13. **Angkatan 2016 sampai Angkatan 2021** Humanis Fisip Unhas, selamat berproses semoga cita-cita kalian dapat tercapai
14. **Sospol Dance Fisip Unhas (Kak cacang dan kak Lisda)** yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan prestasi dalam menari selama masa perkuliahan
15. **Panca Suci Fisip Unhas** yang telah yang telah mengajarkan seni bela diri serta menjadi keluarga baru penulis, memberikan kebersamaan

dan kehangatan serta pengalaman organisasi bagi penulis selama masa kuliah

16. **Teman-teman KKN Gel. 105** Kabupaten Wajo-Sidenreng Rappang yang telah memberikan kenangan-kenangan manis selama masa KKN meskipun pertemuan hanya beberapa kali karna terkendala Covid-19

17. Terima kasih untuk **semua pihak** yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala doa dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini

Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja semoga Tuhan YME melimpahkan segala Rahmat-NYA serta membalas kebaikan semua pihak

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan terkhusus bagi para pembaca. Terima kasih

Salam sejahtera untuk kita semua

Makassar, 20 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	6
I.3 Tujuan Penelitian	6
I.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1 Konsep Kebijakan Publik	8

II.1.1 Ciri Kebijakan Publik	10
II.1.2 Proses kebijakan Publik	11
II.2 Konsep Implementasi Kebijakan	15
II.2.1 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan	17
II.2.2 Model Implementasi Kebijakan.....	20
II.3 Konsep Program Keluarga Harapan	26
II.3.1 Tujuan Program Keluarga Harapan	27
II.3.2 Sasaran dan Kriteria penerima PKH.....	27
II.3.3 Hak dan Kewajiban Penerima bantuan PKH	28
II.3.4 Mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan PKH.....	32
II.3.5 Landasan Hukum Program Keluarga Harapan	35
II.4 Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	
III.1 Pendekatan Penelitian	40
III.2 Lokasi Penelitian	40
III.3 Fokus Penelitian	41
III.4 Informan	42
III.5 Jenis dan Sumber Data	42
III.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
III.7 Teknik Analisis Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidrap	46
IV.1.1 Keadaan geografis	46

IV.1.2 Kondisi Demografis.....	48
IV.1.3 Kemiskinan.....	49
IV.2 Gambaran Umum Kecamatan Tellu Limpoe	51
IV.2.1 Letak Geografis	51
IV.2.2 Kepadatan Penduduk	52
IV.2.3 Derajat Kesehatan dan Pendidikan	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
V.1 Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan	
Tellu Limpoe	64
V.1.1 Komunikasi	69
V.1.2 Sumberdaya	72
V.1.3 Disposisi	74
V.1.4 Struktur Birokrasi	75
BAB VI PENUTUP	
VI.1 Kesimpulan	79
VI.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Proses Kebijakan Publik	14
Gambar II.4 Kerangka Pikir	39
Gambar IV.1 Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	48

DAFTAR TABEL

Tabel II.3 Besaran Bantuan Penerima PKH	31
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Dari Tahun 2016-2022	49
Tabel IV.2 Garis Kemiskinan, Jumlah, Dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020	50
Table IV.3 Luas Desa, jarak dari Ibu Kota dan ketinggian dari permukaan air laut menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2020	52
Tabel IV.4 Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020	53
Tabel IV.5 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020	55
Tabel IV.6 Banyaknya Dokter, Paramedis, Dan Dukun Bayi Menurut Desa/ Kelurahan Di Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020	56
Tabel IV.7 Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2020.....	57
Tabel IV.8 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, Dan Bergizi Buruk Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020	58
Tabel IV.9 Banyaknya Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Dan Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020	59

Table IV.10 Banyaknya TK/RA, Kelas, Murid, Dan Guru ,Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tellu Limpoe	60
Tabel IV.11 Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid, Dan Guru SD Dan MI Negeri Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tellu Limpoe	61
Tabel IV.12 Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid Dan Guru SMP Dan MTS Negeri Menurut Desa/ Kelurahan Di Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020	61
Tabel IV.13 Angka Partisipasi Murni (APM) Dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang 2018, 2019, Dan 2020	62
Tabel IV.14 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Dan 2020	63
Tabel V.1 Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan Di 4 Tahun Terakhir	65

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Terciptanya masyarakat yang adil dan Makmur sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat UUD 1945 merupakan cita-cita mulia bangsa Indonesia. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir diseluruh negara didunia. Kemiskinan tidak hanya meliputi negara berkembang, akan tetapi juga ada dinegara-negara maju. Selama bertahun-tahun, miskin didefenisikan sebagai tidak memiliki cukup uang. Banyak negara terus mengukur kemiskinan hanya dari sisi pendapatan, konsumsi atau akses terhadap pelayanan. Salah satu defenisi kemiskinan yang paling dikenal adalah garis kemiskinan dengan pendapatan minimal US\$ 1 per hari. Bank dunia menggunakan standar ini untuk membandingkan kemiskinan secara global (World Bank 2000/01, 2002)

Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu penghambat proses pembangunan sebuah negara. Salah satu negara yang masih dibelit oleh maalah sosial ini adalah Indonesia. Kabar baiknya, berdasarkan data Badan Pusat Statistic (BPS), angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 9,22. Lebih rendah dibanding Maret 2019 yang jumlahnya 9,41 persen persen (BPS:2019).

Penurunan angka kemiskinan pun konsisten terjadi jika melihat angka kemiskinan di Maret 2018 yang angkanya 9,82 persen. Ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia pun terus menurun. BPS menjelaskan, faktor yang menyebabkan angka kemiskinan menurun antara lain, kesejahteraan petani yang meningkat serta keberhasilan pemerintah mengendalikan inflasi.

Namun pada tahun 2020, kemiskinan kembali meningkat di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia. Ini disebabkan karena penghasilan masyarakat yang menurun dan banyaknya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh dampak pandemi covid-19. Selain itu, meningkatnya jumlah kemiskinan disebabkan oleh kesejahteraan petani yang merosot karena menurunnya hasil panen. Hasil panen pertanian dan perkebunan yang tidak dipasarkan karena pasar ditutup dan daya beli masyarakat yang menurun sehingga tidak sedikit tukang kebun yang membiarkan hasil kebunnya membusuk dipohonnya (tidak dipanen) karena tidak mampu membayar gaji pekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap maret 2019 (BPS:2020)

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa dibentuknya Negara Indonesia dan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya dalam pemahaman tersebut fenomena kemiskinan adalah tanggung jawab negara yang dalam hal ini adalah pemerintah, Adapun kutipan preambule UUD 1945 tersebut sebagai berikut :

“..... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan sudah banyak didukung dengan aturan seperti Undang-Undang no 11 tahun 2010 tentang kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Berbagai program untuk mengatasi kemiskinan seringkali terbentur oleh perilaku kemiskinan kultural. Mereka yang mengalami kemiskinan kultural mungkin sudah pasrah dan menerima keadaan apa adanya karna keengganan mereka untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Hal ini menyebabkan mengapa jumlah orang miskin seolah stagnan. Kemiskinan kultural menimbulkan mental yang suka meminta.

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah juga menggunakan berbagai program. Salah satu program yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial no 1

tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Dalam istilah internasional Program Keluarga Harapan dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT).

PKH berfungsi sebagai salah satu program jaring pengaman bagi masyarakat miskin agar terlindungi dari kemungkinan kondisi krisis. PKH dalam jangka Panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui perbaikan kondisi pendidikan dan Kesehatan. Dengan peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan dalam keluarga penerima manfaat (KPM), kesempatan kerja yang lebih luas akan terbuka bagi anak dari keluarga PKH di masa depan. Dengan demikian generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan pada awalnya hanya dilaksanakan di 7 provinsi. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan kemudian dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia pada tahun 2013. Tujuan umum PKH adalah mengurangi dan memutus rantai kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). PKH berkonsentrasi pada bidang Pendidikan dan Kesehatan. Sehingga masyarakat miskin dapat menyekolahkan anaknya yang duduk dibangku Sekolah Dasar(SD) dan SLTP. Adapun untuk bidang Kesehatan agar bisa membantu Kesehatan balita dan ibu hamil untuk aktif melakukan pemeriksaan

Kesehatan ke puskesmas setempat dan memberikan asupan gizi seimbang kepada balita yang lahir dan keluarga yang tidak mampu.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) adalah salah satu kabupaten yang juga melaksanakan Program Keluarga Harapan. PKH sudah ada sejak tahun 2013 di kabupaten Sidrap hingga saat ini. Kabupaten Sidenreng Rappang berada di provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kepadatan penduduk sebanyak 301.972 jiwa pada tahun 2019 yang tersebar di 11 kecamatan.

Dengan adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kabupaten Sidrap, khususnya di Kecamatan Tellu Limpoe, diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan social pada kelompok keluarga miskin. Salah satu kecamatan yang menjalankan Program Keluarga Harapan adalah Kecamatan Tellu Limpoe dengan 1.047 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Observasi awal menunjukkan data yang tidak sesuai dengan fakta, dimana banyak keluarga yang tergolong mampu tetapi mendapat bantuan PKH, sedangkan masih banyak keluarga miskin justru tidak mendapat bantuan PKH. Itu berarti beberapa bantuan dari Program Keluarga Harapan belum tepat sasaran. Maka dari itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi Program

Keluarga Harapan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi

I.4 Manfaat Penelitian

a. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberikan masukan/referensi bagi pelaksana Prigram Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Sidenreng Rappang agar dapat meningkatkan pelayanan di masyarakat.

b. akademis

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kebijakan publik khususnya implementasi kebijakanserta dapat memberikan referensi bagi peneliti pihak lain yang juga tertarik pada penelitian ini

c. manfaat bagi penulis

Menambah dan memperluas wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan terhadap permasalahan yang diteliti, serta merupakan

pembelajaran/pengalaman berharga dalam mengapresiasi ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu dimensi pokok dalam ilmu administrasi publik, karna segala aktivitas kehidupan bernegara, bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, pihak swasta dan masyarakat. Kebijakan merupakan suatu proses formulas, implementasi dan evaluasi kebijakan yang saling berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur, mengelolah dan menyelesaikan berbagai urusan publik.

Menurut Thomas R.Dy (Wahab, 2012:14) mengatakan bahwa kebijakan public adalah apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pokok kajiannya adalah negara. Yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan akan memiliki dampak atau pengaruh terhadap negara. Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) karna kebijakan public itu meliputi semua Tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disampin itu, jika pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu maka juga akan memilik dampak.

Kebijakan publik Menurut W.I Jenkins adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh actor politik atau kelompok actor,

berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam satu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para actor tersebut (Wahab,2012:15)

Anderson (Leo Agustino,2016:17) mendefenisikan kebijakan public sebagai berikut :

“ A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu yang diperhatikan”

. Kebijakan menurut George R.terry dalam bukunya,Principles of Management, adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran Tindakan yang akan dilakukan pemimpin (Terry,1964:278).

Kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R.,2003:1-7). Kebijakan public dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan). Kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan yang ketiga bagaimana kebijakan public tersebut dievaluasi (Nugroho,2004:100-105).

II.1.1 Ciri Kebijakan Publik

Menurut Idris Patarai dalam bukunya Kebijakan Publik Daerah posisi Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan (2020:78-80), menyebutkan ciri-ciri Kebijakan Publik adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik Mempunyai Arahan yang Jelas

Setiap kebijakan public, meskipun tidak diumumkan secara langsung kepada rakyat mempunyai arahan yang jelas. Kebijakan lahir karna adanya suatu masalah yang harus dipecahkan. Dengan demikian, setiap kebijakan publik mempunyai arah dan tujuan yang jelas

2. Kebijakan Publik Mempunyai Aktor

Aktor adalah orang yang berperan dalam masalah atau dibuatnya kebijakan yang ada. Aktor adalah eksekutif, dan yang terlibat didalamnya, legislatif atau yang terlibat didalamnya. Siapa saja yang ada dibalik sebuah kebijakan adalah aktor yang didalam bahasa sistem politik adalah elit politik

3. Kebijakan Publik Mempunyai Standar Implementasi

Tidak semua kebijakan publik dilaksanakan. Ada beberapa mungkin yang pada akhirnya tidak dikerjakan karna beberapa sebab. Maka ciri ketiga kebijakan publik ini adalah standar implementasi, dikerjakan atau tidaknya sebuah kebijakan publik ada kriteria standar.

4. Kebijakan Publik Mempunyai bentuk Hubungan

Kebijakan publik mempunyai bentuk hubungan dengan instansi terkait. Tidak dapat ada dan berdiri sendiri. Kebijakan publik berhubungan dengan semua instansi, Lembaga negara dan organisasi yang terkait dengan kebijakan tersebut. Berhubungan pula dengan masyarakat yang mendapat pengaruh atas suatu kebijakan yang dikeluarkan.

5. Kebijakan Publik sebagai Instruksi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan public adalah instruksi atau perintah. Perintah kepada masyarakat untuk melaksanakannya. Instruksi terhadap Lembaga terkait untuk membantu dan mendukung kebijakan yang dijalankan.

II.1.2 Proses kebijakan publik

Menurut Dunn dan Valdivieso (2015:35) proses kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis (Dunn dan Valdieso,2015:35). Sedangkan Winarno (2012:35) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karna melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji (Winarno,2012:35). Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu Menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur Lembaga atau keputusan peradilan.

4. Implementasi kebijakan

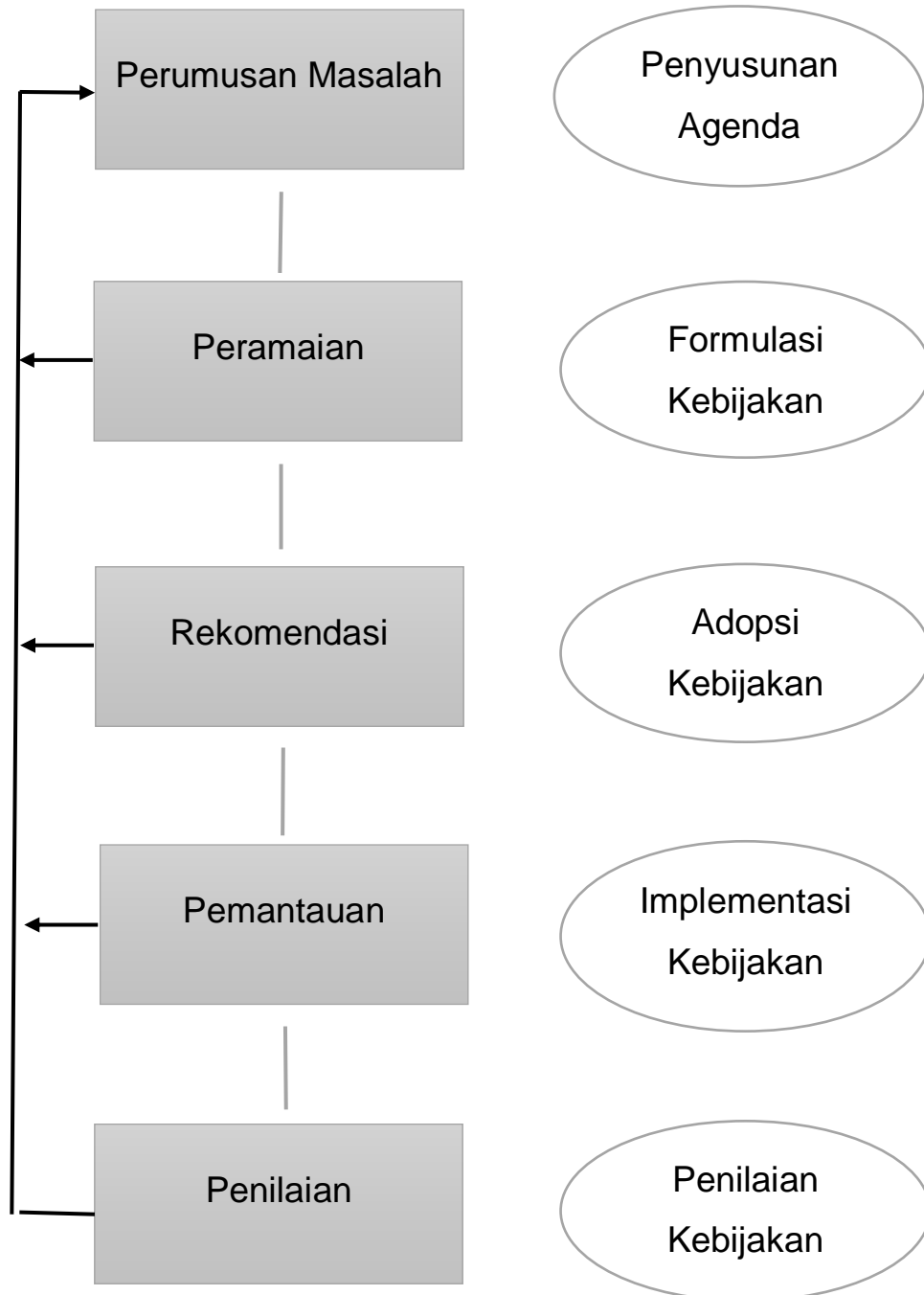
program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan

keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

5. Penilaian kebijakan atau Evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Menurut Lester & Stewart (2000:126) evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat

Gambar II.1 : Proses Kebijakan Publik



Sumber : Dunn, 2003: 25

II.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakandapat mencapai tujuannya. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:54). Berdasarkan pendapat ini maka implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi publik dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja Bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan

Menurut Sabatier, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksklusif yang penting atau keputusan badan peradilan (Kadji,2008:28). Maka seharusnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002 :102) membatasi implementasi kebijakan sebagai Tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Brigman dan Davis (Suharto,2007:36) mengatakan implementasi kebijakan sebagai tahap yang melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada public mengenai pilihan kebijakan yang diambil,

instrument kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah disiapkan dan laporan-laporan yang dievaluasi.

Dalam implementasi kebijakan, yang paling diperhatikan adalah dampak yang dipersepsikan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan Lembaga-lembaga atasan yang berwenang (Wahab, 2011:107). Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono 2014:107). Proses implementasi kebijakan public baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan public telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan.

Jadi, implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat keputusan harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi negara dan masyarakat atau justru hanya memberikan dampak yang buruk. Hal itu bertujuan agar kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat atau merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Menurut Udoji dalam bukunya Wahab Analisis Kebijakan (2012:126) mengatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada

pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Begitu pentingnya dimensi implementasi sebuah kebijakan, maka persyaratan utama yang harus diperhatikan menurut Kadji (2008:30) adalah :

1. Mereka yang akan mengimplementasikan suatu keputusan seharusnya tahu apa yang mereka laksanakan.
2. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sesuai sasaran dan arahan kebijakan
3. Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, maka produk kebijakan itu tidak sekedar dapat diterima tetapi jelas apa yang menjadi sasaran dan arahan kebijakan itu.

II.2.1 Faktor penentu implementasi kebijakan

Secara sederhana, semua kebijakan public dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku manusia dalam berbagai cara. Kebijakan dapat bersifat membujuk orang supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang diharapkan oleh kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan.

Ada beberapa hal yang mengakibatkan satu implementasi kebijakan dikatakan efektif atau tidak, diantaranya :

- a. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah

Faktor penentu keefektifan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas penghormatan dan penghargaan public pada pemerintah yang legitimat. Apabila publik menghormati pemerintah yang berkuasa oleh karena legitimasinya, maka secara otomatis mereka akan turut memenuhi ajakan pemerintah melalui pelbagai bentuk kebijakan

b. Kesadaran untuk menerima kebijakan

Dalam masyarakat, banyak dijumpai individu tau kelompok yang mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik. Namun disisi lain terdapat individu tau kelompok yang tidak taat dan tidak mau melaksanakan kebijakan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah mindset warga

c. Ada atau tidaknya sanksi hukum

Orang akan melaksanakan dan menjalankan kebijakan karna mereka takut terkena dampak sanksi hukum yang dijabarkan oleh konten suatu kebijakan. Selain itu, subjek kebijakan seringkali mematuhi dan melaksanakan suatu aturan perundangan karna ia tidak suka dikatakan sebagai orang yang melanggar aturan hukum sehingga dengan terpaksa mereka melakukan apa yang diarahkan oleh kebijakan tersebut.

d. Kepentingan pribadi atau kelompok

Subjek kebijakan yang memperoleh keuntungan langsung dari suatu pelaksanaan kebijakan. Maka tisak heran apabila efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan.

e. Bertentangan dengan sistem nilai yang ada.

Implementasi kebijakan dapat berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan system nilai yang ada di suatu daerah.

- f. Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi
Kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang atau sekelompok orang pada kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung atau tidak bergabungnya subjek kebijakan dalam suatu organisasi tertentu atau tidak.

- g. Wujudnya kepatuhan selektif

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua subjek kebijakan patuh atas aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini karena ada Sebagian besar masyarakat yang takut pada suatu kebijakan tertentu, tetapi tidak pada kebijakan lain

- h. Waktu

Jika suatu masyarakat memandang suatu kebijakan bertolakbelakang dengan kepentingan mereka, maka warga akan berkecenderungan untuk menolak kebijakan tersebut. Tetapi dengan berjalannya waktu, suatu kebijakan yang awalnya ditolak dan dianggap kontroversial bisa berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat.

- i. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasikan. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisajadi tidak tercapai.

- j. Koordinasi antar-lembaga atau antar organisasi

Koordinasi merupakan hal penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan. Terkadang suatu kebijakan dianggap baik dalam segi konten tetapi lemah dalam segi pelaksanaan.

II.2.2 Model implementasi kebijakan

a. Implementasi kebijakan model Donald van Metter & Carl van Horn

Ada 6 variabel, menurut van Metter & Carl van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik

- Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan

- Sumber daya

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya yang lain yang perlu diperhatikan juga ialah sumberdaya finansial dan waktu. Ketika sumber daya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah dalam merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Sama halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal

inipun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

- Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat mengimplementasikan kebijakan public. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

- Sikap atau kecenderungan para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik

- Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya

- Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondusifitas kondisi lingkungan eksternal

b. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu :

- Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu

1. Transmisi: penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula
2. Kejelasan: komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan
3. Konsistensi: jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan

- Sumber daya

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas

1. Staf: kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak

mencukupi, kurang memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya

2. Informasi: dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan
 3. Wewenang: kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik
 4. Fasilitas: tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
- Disposisi
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.
 - Struktur birokrasi
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya Kerjasama banyak orang, Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga

menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

c. Implementasi kebijakan model Merilee S.Grindle

Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan public dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

- Apakah pelaksana kebijakan sesuai dengan yang ditentukan
- Apakah tujuan kebijakan tercapai

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat implementability yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy

1. Content of Policy

- Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
- Tipe manfaat
- Derajat perubahan yang ingin dicapai
- Letak pengambilan keputusan
- Pelaksana program
- Sumber-sumber daya yang digunakan

2. Context of Policy

- Kekuasaan kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat
- Karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa

- Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

d. Implementasi Kebijakan Model Daniel H. Mazmanian & Paul A.Sabatier

Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu :

- Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap
- Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
- Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara

tepat

e. Implementasi kebijakan model Thomas R.Dye

Model implementasi kebijakan dari Dye sering disebut juga dengan istilah 'Model Implementasi Interaktif'. Model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan

f. Implementasi kebijakan model Charles O.Jones

Menurut Jones dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yaitu :

- Organisasi: pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak
- Interpretasi: menafsirkan Bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
- Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

II.3 Konsep Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas Pendidikan ataupun kehadiran di fasilitas Kesehatan. PKH menjadi salah satu program pemerintah yang di andalkan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Sejak tahun 2017 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT)

II.3.1 Tujuan PKH

Dalam jangka pendek, PKH bertujuan untuk mengurangi beban RTSM, dalam jangka Panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan

Tujuan khusus dari adanya Program Keluarga Harapan :

1. Meningkatkan taraf hidup dari keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada penerima manfaat (Pedoman Pelaksanaan PKH 2020 : 3-4)

II.3.2 Sasaran dan kriteria penerima PKH

Sasaran penerima PKH adalah keluarga yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Kementerian Sosial RI. Keluarga tersebut harus memiliki komponen Kesehatan, Pendidikan dan/atau

kesejahteraan sosial untuk ditetapkan sebagai KPM PKH (Pedoman Pelaksanaan PKH 2020 : 4)

Kriteria Penerima PKH adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria komponen Kesehatan meliputi :
 1. ibu hamil/menyusui
 2. anak yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun
- b. Kriteria komponen Pendidikan meliputi :
 1. anak SD/MI atau sederajat
 2. anak SMP/MTs atau sederajat
 3. anak SMA/MA atau sederajat
 4. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 1. Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun
 2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

II.3.3 Hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

Hak keluarga penerima manfaat PKH mengacu pada Permensos Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 6 yaitu :

1. Bantuan sosial PKH
2. Pendampingan PKH
3. Pelayanan di fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial

4. Program bantuan komplementer dibidang Kesehatan, Pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Kewajiban keluarga penerima manfaat PKH mengacu pada Permensos Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 7 yaitu :

1. Memeriksa Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai dengan protokol Kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hasil belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun
3. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas berat

Komponen Kesehatan sebagaimana yang dimaksud adalah, memeriksa Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan atau petugas pelayanan Kesehatan atau kader Kesehatan di desa bagi ibu hamil dan nifas. Memeriksa Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan atau petugas pelayanan Kesehatan atau kader Kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu eksklusif. Memeriksa Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan atau petugas pelayanan Kesehatan atau kader Kesehatan di desa bagi bayi dan balita

Komponen Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas Pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, Pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud adalah dengan memberikan makanan bergizi dan memanfaatkan bahan pangan local dan perawatan Kesehatan paling sedikit satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun. Meminta tenaga Kesehatan yang ada untuk memeriksa Kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak memenuhi kewajiban sebagai KPM PKH maka akan dikenakan sanksi berupa penangguhan atau penghentian bantuan sosial PKH

Besaran bantuan

Pada tahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program PKH dengan beberapa penyesuaian khususnya pada besaran anggaran, yaitu menjadi Rp 29,13 triliun atau menurun dari tahun sebelumnya, bantuan regular serta afirmasi dihilangkan, dan adanya peningkatan nilai bantuan untuk komponen Kesehatan menjadi Rp3.000.000,00 dari tahun 2019 sebesar Rp.2.400.000,00 (Pusat Kajian AKN:2020:5)

Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM dapat menjadi berbeda tiap tahunnya dikarenakan adanya perubahan dan perkembangan kebijakan PKH.

Tabel II.3 Besaran Bantuan Penerima PKH

Indeks dan faktor penimbang bantuan sosial PKH 2020 (Rp)/bulan

Penerima PKH	Besaran Bantuan/bulan
Kategori Ibu Hamil/Nifas	Rp 250.000,-
Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun	Rp 250.000,-
Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp 75.000,-
Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp 125.000,-
Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp 166.000,-
Kategori Penyandang Disabilitas berat	Rp 200.000,-
Kategori Lanjut Usia	Rp 200.000,-

(pkh.kemsos.go.id)

Bantuan komponen Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas Kesehatan dan Pendidikan terdekat

II.3.4 Mekanisme Pendataan dan Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

PENDATAAN

1. Pada Tahun 2005 dilaksanakan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Sensus kemiskinan pertama di Indonesia). Pendataan tersebut bertujuan untuk mendata : Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Data Tersebut Digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH.
2. Pada Tahun 2007 Pilot Projek Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai di 7 Provinsi.
3. Pada Tahun 2008 dilaksanakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).
4. Pada Tahun 2011 Data PPLS (Data 40% menengah kebawah) oleh BPS diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk dijadikan Basis Data Terpadu (BDT). BDT digunakan berbagai program bantuan dan Program Perlindungan Sosial Tahun 2012-2014.
5. Pada Tahun 2012 dimulai Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Bireuen
6. Pada Tahun 2015 BDT hasil PPLS 2011 di mutakhirkan oleh BPS melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan diserahkan ke Kemensos melalui Pusdatin Kessos.

7. Pada Tahun 2016 pengelolaan data terpadu berada dibawah Kemensos melalui Pusdatin Kessos untuk tanggungjawab pemutakhiran data terpadu diserahkan kepada Daerah masing-masing.
8. Pada Tahun 2017 dikembangkan Aplikasi SIKS-NG yang digunakan untuk mengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT PPFM & OTM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) , Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
9. Pada Tahun 2019 perubahan nomenklatur dari DT PPFM; OPM menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data diperluas pengelolaannya bukan cuma saja data fakir miskin, tetapi juga meliputi Data Bansos, Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
10. Pada Tahun 2019 mulai diperkenalkan SIKS-NG dengan flatform android SIKS-Droid untuk memudahkan pendata melakukan verifikasi dan validasi data tanpa perlu mencetak prelist menggunakan kertas.

PENYALURAN

1. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial
 - Pembukaan rekening secara kolektif (Bulk Account Opening)
 - Cetak (perso) Kartu
 - Produksi PIN Mailer
 - Laporan hasil proses Bulk Account Opening
2. Sosialisasi dan edukasi

- Sosialisasi Bansos Non Tunai PKH kepada Agen dan KPM oleh bank penyalur dan Kemensos. (KPM baru)
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- Distribusi KKS, Buku Tabungan dan PIN Mailer dari KP ke KC
 - Distribusi KKS, Buku Tabungan dan PIN Mailer dari KC kepada KPM
 - Penandatanganan Aplikasi Pembukaan Rekening dan surat pernyataan persetujuan atau kuasa untuk memberikan informasi nomor rekening dan data pribadi.
 - Full aktivasi
 - Laporan hasil penerimaan aplikasi pembukaan rekening
4. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH
- Pengecekan rekening dengan data yang akan diajukan bantuannya
 - Pengajuan dana Ke KPPN
 - Pembuatan Surat Perintah pemindahbukuan/Standing Instruction (SI) ke Bank Penyalur Pusat Pelaksanaan pemindahbukuan/Standing Instruction (SI)
 - Laporan hasil pemindahbukuan
5. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH
- Dinas Sosial dan bank penyalur melakukan koordinasi persiapan penarikan dana bansos PKH
 - Penarikan Dana oleh KPM

6. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH
 - Rekonsiliasi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, ke tingkat pusat
 - Rekonsiliasi dilakukan oleh Bank Penyalur bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Provinsi, dan tingkat pusat

7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan sosial;
 - Laporan periodik setiap tahap penyaluran
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH
 - Analisa kecenderungan penyaluran bansos dari dashboard
 - Analisa kecenderungan pengaduan terkait penyaluran bansos berdasarkan laporan contact centre PKH

II.3.5 Landasan hukum dan dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan

- a. Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- b. Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin
- c. Peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- d. Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

- e. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin Lampiran ke 46
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan

Dasar pelaksanaan PKH

- a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No:31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007
- b. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008
- c. Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”
- d. Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) kabupaten/kota/TKPKD
- e. Surat kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan

II.4 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah

penelitian. Kerangka pemikiran harus didasarkan pada sebuah teori yang dijadikan landasan sekaligus menjadi alat yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III karena dalam teori ini digunakan empat faktor penentu dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Peneliti mengamati bagaimana implementasi program keluarga harapan di kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai salah satu program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan serta peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut sehingga peneliti menggunakan teori Edward III yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi .

- Komunikasi, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi
- Sumber daya, terdiri dari beberapa elemen yaitu Staf atau Sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas
- Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksana kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus

memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias

- Struktur birokrasi, kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya Kerjasama banyak orang, Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini dapat menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

Gambar II.4 Kerangka Pikir

